

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

A. LATAR BELAKANG Dalam pelaksanaan pembangunan setiap Pemerintah Daerah memerlukan perencanaan yang akurat serta dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya tidak terkecuali Kabupaten Bintan. Salah satu indikator yang digunakan untuk perencanaan pembangunan di suatu daerah adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan fluktuasi harga dari paket barang dan jasa konsumsi masyarakat yang disebut inflasi bila naik dan deflasi bila terjadi sebaliknya. Secara umum penyebab inflasi ada tiga macam yaitu Pertama karena kenaikan permintaan (demand pull), yaitu inflasi yang disebabkan oleh karena adanya kenaikan permintaan secara rata-rata terhadap berbagai barang dan jasa yang apabila tidak dapat diimbangi peningkatan produksi/penawaran akan memaksa peningkatan harga barang dan jasa. Kedua karena kenaikan ongkos produksi (cost push). Ketiga karena peningkatan jumlah uang beredar (monetary inflation) yaitu inflasi yang disebabkan adanya kenaikan jumlah uang yang beredar, misalnya dengan cara pencetakan uang baru, pengeluaran kembali uang lama sehingga jumlah uang yang beredar semakin banyak. Adapun arahan yang dilaksanakan pada acara Rakornas TPID di Jakarta pada Tahun 2021 yang harus diperhatikan oleh setiap Kabupaten/Kota sebagai berikut: A. Mempertegas Komitmen Pemerintah Daerah TPID dalam menjaga stabilitas harga dengan mewujudkan strategi 4 K pada acara Rakornas TPID yang dilaksanakan, Strategi 4 K yaitu : 1. Ketersediaan Pasokan; 2. Keterjangkauan Harga; 3. Kelancaran Distribusi 4. Komunikasi yang efektif. B. Mengintegrasikan RoadMap Pengendalian Inflasi dengan Rencana Kerja Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah. C. Penguatan Peran TPID Provinsi dalam mengoordinasikan TPID Kab/Kota untuk mendukung pencapaian Sasaran inflasi Nasional. D. Meningkatkan kualitas data /informasi terkait produksi Konsumsi, Pasokan, stok, harga dan termasuk juga penguatan PIHPS untuk mendukung kebijakan stabilisasi harga. E. Mengatur Pola tanam antar daerah serta penguatan kerjasama antar daerah surplus dan deficit. F. Meningkatkan intensitas implementasi program Tol Laut dengan perluasan cakupan daerah untuk mengurangi Disparitas harga . G. Perlu upaya untuk mendorong perubahan preferensi masyarakat terhadap pola konsumsi. Arahan Presiden terkait 4 Kunci yang harus dilakukan dalam pengendalian Inflasi adalah: 1. Penyediaan Anggaran Pengendalian Harga oleh semua Pemerintah Daerah (agar dapat melakukan intervensi jika diperlukan). 2. Agar semua unsur di daerah seperti : Pemda, Kejaksaan, Kepolisian, dan BI secara rutin melakukan Pemeriksaan pasokan bahan pokok digudang penyimpanan. 3. Memastikan Transportasi di daerah, antar daerah selalu lancar. 4. Menjaga distribusi barang. Tugas TPID Kabupaten Bintan yaitu: 1. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa di setiap OPD terkait yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Bintan , Dinas Koperasi ,Usaha Mikro dan Perindustrian dan Perdagangan Kab.Bintan, Dinas Perikanan Kab.Bintan, Satgas Migas dan Satgas Pangan. 2. Menjalankan Peta Jalan Road Map Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2021-2023 sesuai dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 66 Tahun 2022. 3. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di tingkat Kabupaten Bintan. 4. Melakukan Koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi. 5. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Bintan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Inflasi Maret 2021 provinsi kepri , kota tanjungpinang, dan kota batam mengalami deflasi utama didorong penurunan harga cabai ,merah , cabai rawit dan telur ayam ras yang seiring

lancarnya pasokan dan panen pada sentra produsen yang didukung kondisinya kondisi cuaca. dari hasil rapat Koordinasi TPID Triwulan I dan Menyambut Bulan Suci Ramadhan pada hari Selasa tanggal 07 April 2021 di ruang rapat II Kantor Bupati Bintan tercatat pada bulan April ketersediaan beras di gedung Bulog GBB Kota Piring Tanjungpinang 1.425,85 Ton, Ketersediaan Cabe Rawit, Cabe Besar, Bawang Merah, Bawang Putih tersedia di Pasar, ketersediaan daging sapi/kerbau di Bulog 4 Ton dan distributor/pasar 24, 650 ton (daging beku), produksi jagung 59,718 ton (panen muda), total produksi sayuran 305,1 ton, minyak goreng di BULOG GBB Kota Piring Tanjungpinang 2.008 liter ekuivalen 1.600 Kg. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindag Kabupaten Bintan data didata dari distribusi, toko dan pengecer prtanggal 1 April 2021 1. Beras (Distributor: 145 Ton), (Toko/Pengecer/Pasar : 189 ton) 2. Gula (Distributor: 265 Ton), (Toko/Pengecer/Pasar : 76 ton) 3. Minyak Goreng (Distributor: 116 Liter), (Toko/Pengecer/Pasar : 41 Liter) 4. Tepung (Distributor: 36 Ton), (Toko/Pengecer/Pasar : 21 Ton) 5. Mie Instan (Distributor: 1300 dus), (Toko/Pengecer/Pasar : 9344 Dus)

### 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

melakukan Koordinasi dalam rangka peningkatan Peran TPID dalam pemantauan indikator ekonomi daerah dan identifikasi Rantai Nilai Lokal (Lokal Value Chain) kepada OPD dan Tim TPID

### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Bagian Perekonomian dan SDA setda Kab.Bintan berkoordinasi kepada OPD terkait pelaksanaan program berdasarkan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2021-2023 bertujuan untuk merencanakan program yang akan dilakukan pada tahun 2021,2022 dan 2023.(Kondisi Covid yang meningkat dan kebijakan PPKM menyebabkan koordinasi tim TPID kurang efektif) 2. sinkronisasi data terkait pengendalian inflasi baik dari Bank Indonesia, BPS, Bulog, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindag 3. Tim Pengendalian Daerah (TPID) Kabupaten Bintan menjalankan program mengacu kepada Roadmap agar tujuan dan komitmen bersama tim dapat berjalan lancar dan tercapai sebagaimana amanat Keppres Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Kepmendagri Nomor 500.05-8135 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah untuk wilayah Kabupaten Kota 4. membuat neraca pangan strategis oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindag 5. Meningkatkan Pengawasan oleh Satgas Pangan dan Migas terhadap pendistribusian komoditi pangan maupun BBM dan LPG Bersubsidi 6. Evaluasi Kegiatan TPID

### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dari hasil Rapat TPID tentang Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Bintan Triwulan IV dalam Menyambut Natal dan Tahun Baru baru pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 didapatkan rekomendasi sebagai berikut: 1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan - Buat kan pertanian milenial agar konsumsi masyarakat meningkat - menyiapkan produksi ketersediaan stok pangan menjelang natal dan tahun baru - Produksi bayam harus meningkat 2. Dinas PUPR Kabupaten Bintan -Jalan yang berlubang segera untuk diperbaiki demi kenyamanan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru 3. Dinas Perhubungan - Kendalikan keluar masuknya penumpang baik penumpang yang menggunakan transportasi darat dan laut sehingga tetap patuh pada protokol kesehatan - perbaikan lampu lalu lintas menjelang Natal dan Tahun Baru 4. Dinas Perikanan Kabupaten Bintan - Evaluasi

Ketersediaan Sumber Daya Alam seperti ikan, bilis dll dalam menghadapi musim utara - segera mempersiapkan potensi pariwisata untuk membuka tamu asing masuk ke Daerah Kabupaten Bintan 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bintan - Koordinasi bersama dengan Satgas pangan dan migas terkait evaluasi ketersediaan stok barang pokok dan barang penting di lapangan - perlu adanya kebijakan harga karena Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Gunung Kijang terjadi perbedaan harga pangan